

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

*THE EFFECT OF LOCAL REVENUE (PAD) AND BALANCING FUNDS ON THE REGIONAL
FINANCIAL INDEPENDENCE OF CENTRAL HALMAHERA DISTRICT*

Oleh:

Siti Raun Kristina¹
Amran T. Naukoko²
Hanly F. DJ Siwu³

¹²³Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

Email:

kristinasamosir05@gmail.com

atnaukoko@unsrat.ac.id

hanlysiwu@gmail.com

Abstrak: Pembangunan pada Negara berkembang seperti di Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa dengan cara peningkatan perekonomian guna dalam proses membuka jalan untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada secara benar dan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Data yang digunakan adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah (Data Time Series Tahun 2009-2017). Metode analisis yang di gunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sementara untuk variabel Dana Perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. dan secara bersamaan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, dan Dana Perimbangan

Abstract: Development in developing countries such as in Indonesia are a part that cannot be separated from the development of an way to economy development in the process of opens the way for can use of the existing economic in god and could be able to increase public welfare. In this study attempts to analyze the effects of the genuine peapatan and equalization funds to the financial independence in the central Halmahera. The data used is the data on the local revenue, balance funds and independence of the financial data (time series 2009-2017) year. The method of analysis that in use analytics multiple regression. This research result indicates that the local revenue able to exert positive on increased financial independence districts central Halmahera, while for the balance funds were unable to provide influence on increased financial independence districts central Halmahera. And simultaneously variable local revenue and balance funds able to exert on increased financial independence districts central Halmahera

Keywords: Regional financial Independence, Local Revenue, Balance Funds

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pada Negara berkembang seperti di Indonesia merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa dengan cara peningkatan perekonomian guna dalam proses membuka jalan untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada secara benar dan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang merata dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang ada disuatu daerah termasuk didalamnya pengelolaan hasil kekayaan yang ada guna untuk memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan ekonomi potensial secara tepat akan mampu mendukung pembangunan di bidang yang lain. Untuk perlu adanya kebijakan-kebijakan guna menetralsir proses pembangunan, dan untuk masing-masing daerah yang telah diberikan kewenangan agar dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu proses dimana masing-masing daerah yang ada diberikan hak dan wewenang dalam mengelolah keuangannya sendiri dan diharapkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berada lebih dekat dengan masyarakat serta sumber-sumber daya yang ada dapat mengidentifikasi lebih cepat dan lebih baik potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan perekonomiannya, dimana program desentralisasi dapat lebih maksimal dijalankan. Selain memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah, melalui desentralisasi juga disertakan kewajiban untuk melakukan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat serta mengelolah anggaran rumah tangga yang dimiliki dengan baik.

Diberlakukannya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan adanya kemandirian dari masing-masing daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. adanya reformasi dalam bidang keuangan Negara terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah diterbitkan pula UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan manfaat sumber daya nasional yang diberadilkan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang merupakan pembaharuan dari UU No.25 Tahun 1999. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik sejak bergulirnya reformasi yang membuka kesempatan bagi masyarakat luas menyuarakan pendapatnya.

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu daerah dengan wilayah yang paling luas di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 37 pulau kecil dimana hanya ada dua pulau yang memiliki penduduk yaitu Pulau Gebe dan Pulau Yoi. kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah sebagian besar bergantung dari sektor pertanian dan perkebunan yang juga merupakan salah satu faktor penunjang pendapatan daerah. pendapatan yang diperoleh Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada anggaran Kemandirian yang ada pada lampiran Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Anggaran RKKD Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2009-2017

Tahun	Realisasi Anggaran (Milyar Rupiah)
2009	101.965.769,83
2010	4.840.750,33
2011	3.336.240,59
2012	2.365.020,14
2013	1.946.170,65
2014	1.848.837,00
2015	2.360.513,09
2016	2.371.625,64
2017	3.237.221,78

Sumber: Kantor Keuangan Pemda Halmahera Tengah

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa anggaran RKKD Kabupaten Halmahera Tengah dan untuk anggaran terbesar pada Tahun 2009 yaitu sebesar 101,9 milyar rupiah dan untuk anggaran terkecil yaitu pada Tahun 2014 yaitu sebesar 1,848 milyar dan pada Tahun berikutnya terjadi peningkatan anggaran dari Tahun 2015 sebesar 2,360 milyar meningkat sampai pada Tahun 2017 sebesar 3,237 milyar rupiah. peningkatan dan perubahan anggaran RKKD ini di dorong oleh beberapa faktor penunjang diantaranya adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Tengah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pada kenyataannya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih minim. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih cukup besar. meski demikian Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Tengah terus mengalami peningkatan dari Tahun Ke Tahun yang dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2 Berikut :

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2009-2017

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2009	13.334.545.000,00	13.077.472.000,00
2010	14.233.227.000,00	294.029.353.000,00
2011	11.145.628.258,00	334.077.472.692,00
2012	9.205.254.084,00	389.225.192.000,00
2013	9.010.509.041,00	462.986.585.188,00
2014	9.131.365.000,00	493.897.784.851,00
2015	12.061.160.000,00	510.955.015.000,00
2016	14.955.132.000,00	630.585.693.000,00
2017	18.246.830.000,00	563.657.086.062,00

Sumber: Kantor Keuangan Pemda HalmaheraTengah

Tabel 2 menjelaskan tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Halmahera Tengah mengalami beberapa kali angka fluktuasi di Tahun 2009 sebesar 13,334 juta meningkat sampai pada Tahun 2010 sebesar 14,23 juta dan kemudian di Tahun 2011 terjadi penurunan pendapatan sampai pada Tahun 2014 sebesar 9,13 juta rupiah dan di Tahun 2015 kembali meningkat sampai ada Tahun 2017 sebesar 1,24 juta. sementara untuk Dana Perimbangan terjadi peningkatan dana yang terus melaju terhitung dari Tahun 2009 sebesar 13,07 juta meningkat sampai pada Tahun 2017 sebesar 563 juta.

Ketidakstabilan anggaran merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan berbagai macam upaya dan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah, untuk itu peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat menunjang dalam proses pembangunan daerah dan menstabilisasikan keuangan serta mampu secara mandiri dalam mengelola sumber-sumber daya dan potensi yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah”.

Perumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Tengah?
1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Tengah?
2. Apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Tengah?

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Yuwono (2005) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Darise, 2008:137).

Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan daerah untuk mengelola sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai timbal balik atas pembayaran pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat, diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, dan Dana Perimbangan

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kemandirian Keuangan Daerah /RKKD (Y) merupakan dana kemandirian daerah dari asil pembagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang dalam satuan milyaran rupiah Kabupaten Halmahera Tengah

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Dana\ Perimbangan} \times 100$$

2. Pendapatan Asli Daerah (X1) merupakan dana realisasi pendapatan asli daerah dalam satuan juta rupiah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Dana Perimbangan (X2) merupakan dana realisasi Dana Perimbangan dalam satuan juta rupiah Kabupaten Halmahera Tengah

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan Analisis tabel, Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan program *Microsoft Excel* dan *Eviews 0.8*.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda terdiri dari lebih satu variabel independen dikenal dengan model regresi berganda. Bentuk umum regresi berganda dengan sejumlah k variabel independen dapat ditulis sebagai berikut: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + e_i$. Keterangan: Y_i = Variabel Dependen β_0 = Intersep Konstanta atau nilai Y saat $X = 0, X_1, X_2, X_{ki}$ $\beta_1, \beta_2, \beta_k$ = Parameter dari X_{1t}, X_{2t}, X_{kt} e_i = Standar error

Uji t statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Langkah – langkah pengujiannya sebagai berikut:

Hipotesis:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Uji f statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F. Hipotesis:

- Jika $F_{hitung} < F_{table}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} > F_{table}$, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi R^2

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Didalam regresi sederhana kita juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita punyai. Dalam hal ini kita mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Formula untuk menghitung koefisien determinasi (R^2) regresi sederhana.

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS - SSR}{TSS}, R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

(Sumber, Widarjono 2013: 24)

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah situasi dimana dapat korelasi diantara variabel-variabel independen yang satu dengan yang lainnya sehingga bila nilai koefisien korelasi dari variabel independen mendekati 1 atau sama dengan maka terdapat korelasi yang sempurna (*perfect multicollinearity*). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas bisa dengan membandingkan nilai koefisien determinasi parsial (r^2) dengan nilai koefisien determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak terdapat multikolinieritas. Atau bisa juga menggunakan korelasi antar variabel dimana apabila kurang dari 0,85 tidak ada multikolinieritas dan sebaliknya apabila hubungan variabel diatas 0,85 maka ada multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki problem heterokedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji heterokedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya model barlet dan rank spearman atau uji spearman's, metode grafik park gleyser. (Agus Widarjono hal : 113 2013).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan analisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi menurut (*gujarati 1995*), dapat diketahui dengan metode grafik, metode durbin-watson, metode runtest, dan uji statistic non paramtrik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji OLS**

Tabel 4. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 04/01/17 Time: 00:46				
Sample: 1 9				
Included observations: 9				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

C	2.533794	2.619349	0.967337	0.3707
X1	0.823693	0.247391	3.329517	0.0158
X2	-0.378703	0.051275	-7.385650	0.0003
R-squared	0.922376	Mean dependent var		6.489418
Adjusted R-squared	0.896502	S.D. dependent var		0.234199
S.E. of regression	0.075345	Akaike info criterion		-2.072289
Sum squared resid	0.034061	Schwarz criterion		-2.006548
Log likelihood	12.32530	Hannan-Quinn criter.		-2.214159
F-statistic	35.64806	Durbin-Watson stat		1.164456
Prob(F-statistic)	0.000468			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 0.8

Persamaan: $Y = 2,533 + 0,823 X_1 - 0,378 X_2$

Berdasarkan tabel 4 hasil olahan eviews menjelaskan hasil nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 2,533 variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,823 dan variabel Dana Perimbangan (X_2) sebesar -0,378. untuk nilai standard error dari masing-masing variabel yakni Kemandirian keuangan (Y) sebesar 2.619, variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0.247 dan variabel Dana Perimbangan (X_2) sebesar 0.051.

Hasil Uji Parsial t terhadap parameter Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Hipotesis $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Y).

$H_0 : \beta_i \neq 0$, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Y).

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus:

t tabel : $t_{\alpha : n - k, \alpha = 5\%, = 0,5}$

$N = 10 =$ Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah $N - k = 10 - 3 = 7$ lalu lihat tabel t distribution (df,F) $\sim (10 ; 0,5) = 1,895$. t tabel = 1,895 dan t hitung = 3,329

Karena t hitung $>$ t tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Berarti secara Parsial variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X_1) mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Y). Jadi dapat di simpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap jumlah Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien X_1 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Hasil Uji t terhadap parameter Dana Perimbangan (X_2)

Hipotesis

$H_0 \beta_i = 0$, artinya variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Y).

$H_0 : \beta_i \neq 0$, artinya variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Y).

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus:

t tabel : $t_{\alpha : n - k, \alpha = 5\%, = 0,5}$

$N = 10 =$ Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah $N - k = 10 - 3 = 7$ lalu lihat tabel t distribution (df, F) $\sim (7; 0,5) = 1,895$. t tabel = 1,895 dan t hitung = -7,385.

Karena t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti secara Parsial variabel independen Dana Perimbangan (X_2) belum mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Y). Jadi dapat di simpulkan bahwa Dana Perimbangan belum dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Y) pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Persamaan regresi menunjukkan angka negatif untuk koefisien X_2 dan hal ini

tidak sesuai dengan harapan teoritik bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil Uji Slimutan F statistik

Hipotesis : $H_0: \beta_1 = \beta_2$, artinya secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 tidak berpengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (Y). $H_a: \beta_1 \neq \beta_2$ artinya secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 , berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). $\Omega = 5\%$, $N= 10$ jumlah observasi, $K= 3$ Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah $N-k= 10-3=7$ lalu lihat F tabel distribusi values = ($\Omega = 0,5 : k-1, n-k$) = F tabel = 4,35 F hitung = 35,6

Karena F hitung > F tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Berarti secara bersama-sama variabel indenden mempengaruhi jumlah Kemandirian Keuangan Daerah.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 5 Hasil Multikolinieritas

Variabel	LOG(X1)	LOG(X2)
LOG(X1)	1.000000	-0.106602
LOG(X2)	-0.106602	1.000000

Sumber: Olahan Eviews 0.8

Tabel 5 korelasi antara Log X_1 dengan Log X_2 sebesar 1.000000 dan korelasi antara Log X_2 dan Log X_1 sebesar -0.106602. Melihat rendahnya nilai koefisien korelasi maka diduga tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *White test*, yaitu dengan membandingkan $obs-R^2$ atau X_2 hitung terhadap X_2 tabel. Kriteria keputusan sebagai berikut : Jika nilai $Obs-R^2$ atau X_2 hitung > X_2 tabel (prob<0,05), maka hipotesa yang menyatakan bahwa ada masalah heterokedastisitas dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak dan jika nilai $Obs-R^2$ atau X_2 hitung < X_2 tabel (prob < 0,05), maka hipotesa yang menyatakan bahwa ada masalah heterokedastisitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.

Model mengandung heterokedastisitas bias dapat dilihat dari nilai probabilitas *Chi -Squares* sebesar 0.1836 atau pada $a=18,36$ yang lebih besar dari $a= 5\%$ berarti H_0 di terima dan kesimpulannya tidak ada heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara error pada masa lalu dan error pada masa sekarang dalam suatu variabel. Model persamaan regresi penelitian ini menggunakan analisis *durbin-watson* untuk melihat adalah autokorelasi dalam model. Hasil dari uji tersebut menunjukkan bahwa dalam model persamaan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *durbin-watson* pada hasil estimasi sebesar 1.164 dimana nilai tersebut berada diantara d_l dan d_u , pada batas dimana tidak terdapat autokorelasi jika berada pada nilai antara $d_l = 0,525$ dan $d_u= 2,016$.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis, yang di tujukan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . Berdasarkan hasil estimasi di dapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.922 yang menunjukkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan atau mempengaruhi 0.922% dan sisanya 0,018 % di pengaruhi oleh variabel di luar variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Uji t parsial Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sementara untuk variabel Dana Perimbangan masih belum memberikan pengaruh yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Hasil Uji secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Saran

1. Dengan hasil penelitian ini, maka harapan untuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kedepan adalah memberikan kebijakan terhadap proses kebijakan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan anggaran pemerintah pada berbagai sektor yang ada memerlukan manajerial dan akuntabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan dalam menjaga hubungan dengan pemerintah pusat sebagai koordinasi internal, kemampuan cepat tanggap terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat, kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis dalam meningkatkan anggaran guna pembangunan daerah Kabupaten.
3. Kepada Peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam smith dalam suryana. 2000. Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Algifari, 2000. Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Budianto , 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sulawesi utara. Universitas Sam Ratulangi Jurnal EMBA Vol.4 No.4 Desember 2016, Hal. 844-851
- Darise N, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks
- Endang Sri Mulatsih, 2015. Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012. JURNAL Ekonomi dan Bisnis (JENIUS) VOL. 5 NO. (3)
- Julitawati ,2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164
- Mardiasmo, 2002. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI, Yogyakarta
- M. Abduh AL – Latief , 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Fiscal Stres, terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatra Bagian Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). LP3ES, Jakarta.
- Nina Andriany Nasution, 2010. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fisikal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara. Jurnal megister Akuntansi ISSN 2302-0164
- Reza Marizka, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat (tahun 2006-2011) . Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Lain-Lain :

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Angka Tahun 2009-2017

Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah